

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Natural Resources Defence Council (NRDC) merupakan organisasi lingkungan non-profit internasional yang berfokus pada perubahan iklim, energi bersih, udara dan kesehatan. Organisasi lingkungan ini berdiri pada tahun 1970 di New York yang didedikasikan untuk penelitian dan aktifitas kebijakan (Radicals, 2017). Dengan demikian, organisasi ini sangatlah aktif dalam berperan dan menginiasi sebuah isu-isu lingkungan yang ada di berbagai negara. Ide-ide dan gagasan yang dikembangkan oleh NRDC untuk aktif dalam menanggapi isu-isu terkait dengan lingkungan hidup sangatlah relevan dengan isu-isu yang ada dalam hubungan internasional. Tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim tetapi NRDC juga aktif dalam merespon isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan, kesetaraan gender, keamanan pangan dan lain sebagainya. Di India, NRDC berfokus pada meminimalisirkan dampak perubahan iklim melalui penciptaan energi bersih sebagai salah satu garda depan menuju negara yang maju.

Membahas mengenai isu perubahan iklim, isu lingkungan telah merambah menjadi agenda politik internasional di abad ke 21. Di dalam ilmu hubungan internasional, isu lingkungan khususnya perubahan iklim telah menjadi isu kontemporer untuk terus dikaji. Seiring dengan adanya fenomena pemanasan global yang menciptakan bumi semakin “terancam” oleh dampak-dampak yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari adanya peran *Non-Governmental Organization / International Non-Governmental*

Organization untuk terus mengupayakan dalam meneliti, memonitoring, mengevaluasi dan mengadvokasi isu-isu yang ada dilingkungan masyarakat.

Isu lingkungan telah menjadi dilema kebaikan bersama dan menyentuh semua orang, meskipun tidak dengan cara yang sama. Isu-isu ini saling terkait, dan ini menunjukkan sebuah dunia saling tergantung. Isu-isu ini memiliki dimensi politik, ekonomi, kesehatan, ekologi dan bahkan militer yang sering punya tujuan berbeda. Pemanasan global mengungkapkan ketegangan antara kebutuhan global dan kepentingan para aktor (Richard W Mansbach : 2012).

Hal ini ditandai dengan meningkatnya bukti-bukti ilmiah akan adanya pengaruh aktivitas manusia terhadap sistem iklim dan meningkatnya kepedulian masyarakat internasional akan isu tersebut. Pada pertengahan tahun 1980-an, berbagai pertemuan awal atau konferensi antar pemerintah mulai diselenggarakan untuk membicarakan masalah perubahan iklim. Pentingnya dilaksanakan pertemuan atau konferensi ini karena dirasa perubahan iklim akan menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia.

Diselenggarakannya forum-forum internasional ataupun konferensi-konferensi internasional yang membahas terkait perubahan iklim untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca antropogenik telah menjadi agenda tahunan bagi negara-negara di dunia untuk membicarakan dan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Membicarakan terkait perubahan iklim sebagai perpolitikan internasional tak lepas dari upaya negara dalam menyelamatkan lingkungannya, terlepas itu negara maju maupun negara berkembang. Bagi negara-negara berkembang, isu ini telah menjadi fokus perhatian politik dalam negeri, khususnya India.

Pada tahun 1989 dibentuklah sebuah badan bernama *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) oleh UNEP (*United Nations Environment Programme*) guna untuk merespon isu perubahan iklim bagi pembuat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan data-data ilmiah yang telah didapatkan. IPCC merupakan lembaga lembaga yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia yang bertugas untuk meneliti fenomena perubahan iklim secara ilmiah beserta solusinya (Meiviana : 2004).

Majelis Umum PBB menanggapi serius IPCC untuk mengatasi masalah perubahan iklim secara global. Pada Desember 1990, PBB secara resmi membentuk sebuah badan antar pemerintah , yaitu *International Negotiating Committee* (INC) untuk melakukan negosiasi ke arah konvensi perubahan iklim. Kemudian pada Mei 1992, INC menyepakati secara konsensus sebuah Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC) dan pada Juni 1992 diselenggarakanlah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, dimana pada kesempatan ini Konvensi Perubahan Iklim ditandatangani. Tujuan utama diadakannya Konvensi Perubahan Iklim adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat aman, sehingga tidak membahayakan sistem iklim global.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) global di Paris yang membahas upaya mengatasi dampak perubahan iklim telah melibatkan 195 negara untuk mengikuti konferensi tersebut. Di dalam COP 21 (*Conference of Parties*) di Paris, akhirnya Perancis mengeluarkan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) sebagai pengganti dari Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas yang berdampak pada permasalahan perubahan iklim. Paris Agreement merupakan kesepakatan

internasional yang mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pada tahun 2020 (Firmansyah, 2015).

Dalam konferensi tersebut, Kesepakatan Paris mewajibkan negara - negara berkembang secara terbuka mengumumkan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini merupakan perubahan yang besar dibandingkan Protokol Kyoto dimana hanya Negara kaya yang diwajibkan. Dan untuk menunjukkan tanggung jawab yang baru, Kesepakatan Paris telah menjanjikan kepada negara-negara berkembang bahwa Negara-negara maju akan menyediakan US\$100 miliar pertahun untuk membantu pendanaan teknologi baru dan mitigasi di negara – negara berkembang (Rowlatt, 2015). Dengan demikian, keterlibatan bantuan terkait pendanaan yang dilakukan oleh negara - negara maju merupakan salah satu bentuk kontribusi sekaligus dukungan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca di negara - negara berkembang. Untuk mencapai tujuan diadakannya Kesepakatan Paris tersebut, maka negara - negara berkembang menyepakati agenda dalam pengurangan emisi gas dengan membuat energi bersih sebagai alternatifnya, khususnya Negara India.

India merupakan salah satu negara sedang berkembang dengan populasi penduduk lebih dari satu milyar jiwa. Dengan populasi sebesar itu mendorong masyarakat yang berada di pedesaan melakukan urbanisasi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Arus urbanisasi tersebut mendorong tumbuhnya kegiatan industri yang pesat. Hal ini didukung pula oleh penggunaan energi dengan intensitas yang sangat tinggi (Ghimire, 2001). Meningkatnya populasi dan berkembangnya industri-industri menjadikan polusi semakin tercemar atas

kehadiran industri yang tidak ramah lingkungan. Aktivitas manusia yang demikian telah menjadikan perubahan iklim sebagai indikator adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri-industri besar.

Negara memiliki kebijakannya sendiri dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. India adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas dan merupakan salah satu Negara penghasil emisi gas rumah kaca di dunia yang telah menandatangani kesepakatan iklim global yang dilakukan di Paris. Telah diyakini bahwasanya emisi gas sebagai latar belakang terjadinya perubahan iklim di dunia. Pada kesepakatan ini merupakan perjanjian pertama yang komprehensif yang akan berlaku secara hukum setelah diratifikasi oleh setidaknya 55 negara, dimana beberapa Negara itu berkontribusi dalam menghasilkan 55% dari emisi gas di dunia (Pratiwi, 2016). Tidak menutup kemungkinan bahwasanya kesepakatan yang telah ditandatangani dan diratifikasi India dalam pengurangan emisi gas melalui energi bersih akan memberikan dampak positif bagi India.

Dalam melakukan aksinya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk meminimalisir dampak perubahan iklim, pemerintah india bekerjasama dengan INGO (*International Non-Governmental Organization*) sebagai aktor lain yang fokus pada isu tersebut. Hal ini menandakan bahwa di dalam ilmu hubungan internasional bukan hanya negara yang menjadi aktor utama, tetapi juga ada aktor lain yang berperan dalam interaksi global yaitu *International Non-Governmental Organization*. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan besarnya emisi gas rumah kaca di sektor pengguna energi, yaitu: melakukan konservasi energi dan menggunakan teknologi energi bersih yang tidak

menimbulkan emisi gas rumah kaca. Namun dalam implementasinya perlu suatu mekanisme karena upaya tersebut biasanya memerlukan tambahan biaya.

Hanya dalam waktu lima tahun, berkat Misi Energi Surya Nasional India, India telah hijrah dari kondisi yang nyaris tak memiliki kapasitas energi surya menjadi negara yang berhasil membuat gebrakan, menciptakan salah satu industri listrik surya paling pesat di dunia. Tahun lalu, perusahaan listrik surya terkemuka India telah mengumumkan rencana untuk membangun pabrik baru di India untuk memproduksi sel surya, bagian dari panel solar yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik.

Program domestik India ini muncul di waktu yang tepat, saat industri batu bara India sedang bermasalah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik negara. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi biaya energi surya dan mencapai target kapasitas 175 gigawatt pada tahun 2022, melebihi kapasitas solar yang dihasilkan dari gabungan 5 negara produsen energi surya. India juga berencana memanfaatkan program solar ini untuk membangun manufaktur solar yang berkualitas tinggi namun murah (WPR Series, 2016).

Perdana menteri India, Narendra Modi mengatakan bahwa *“Tehnologi surya tengah berkembang, biaya mulai menurun dan konektivitas jaringan mulai membaik. Mimpi adanya akses universal untuk energi bersih menjadi nyata. Hal ini akan menjadi dasar ekonomi baru di abad baru”* (Sari, 2015).

Murahnya biaya untuk membangun energi surya, India telah bersedia membangun dan menyediakan energi surya bagi penduduknya yang khususnya tinggal di tempat terpencil dan belum memiliki listrik. Hal ini di dorong oleh

hadirnya negara-negara lain yang mendukung India untuk bangkit dan menargetkan untuk menginstal 175GW energi terbarukan pada tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
”Bagaimana kerjasama antara *Natural Resources Defence Council* (NRDC) dengan Pemerintah India dalam meminimalisir dampak perubahan iklim di India pada tahun 2009-2016?”

C. Kerangka Teori

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka penulis menggunakan Konsep NGO (*Non-Governmental Organization*) menurut Philip Eldridge dan Teori Transnasionalisme :

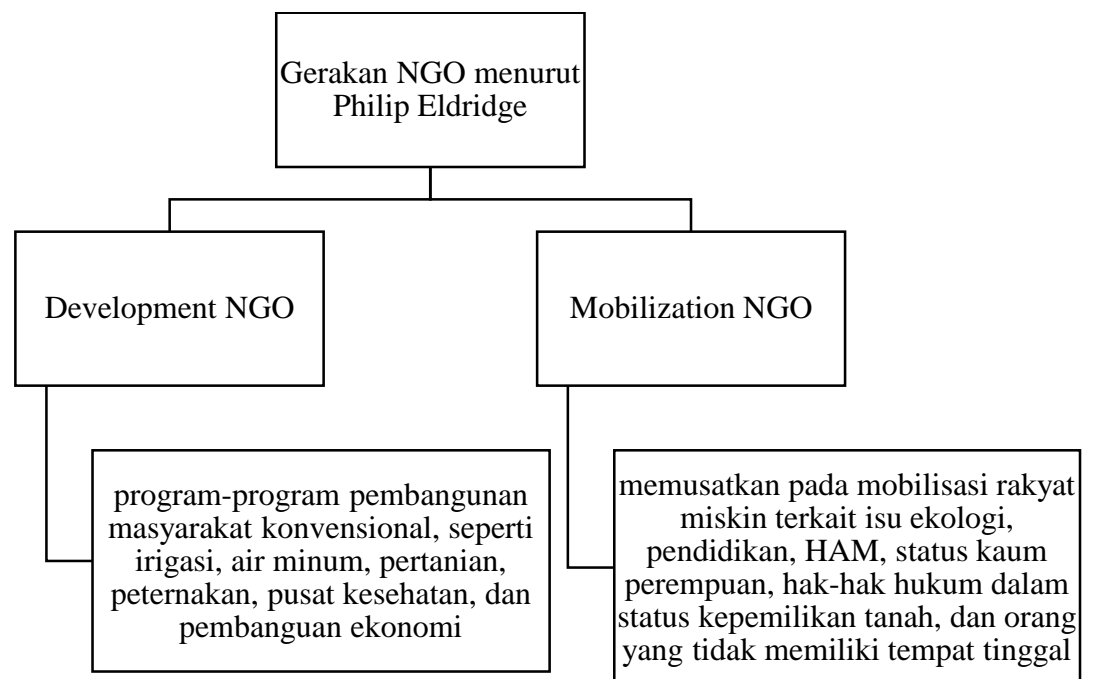
1. Konsep NGO (Non-Governmental Organization)

Pertambahan jumlah (*Non-Governmental Organization*) NGO di tingkat global yang pesat sejak 1960-an telah melahirkan wacana tentang peran penting NGO sebagai agen sosial dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial, pengikisan kemiskinan, proses demokratisasi dan pengembangan masyarakat sipil di negara - negara berkembang (Fisher : 1998). Salamon (1994) dalam sebuah jurnal menyatakan bahwa meningkatnya jumlah aktifitas sukarela yang terorganisir dan pembentukan organisasi - organisasi non-pemerintah atau nirlaba sejak 1960-an di berbagai belahan dunia merupakan sebuah “*global associational revolution*”.

Pertumbuhan jumlah NGO dan perannya yang makin membesar telah melahirkan studi dan kajian yang luas tentang fenomena NGO di kalangan

akademisi, praktisi, agen donor swasta dan resmi. Merebaknya NGO sebenarnya merupakan fenomena yang dipicu oleh donor (*donor-driven*). Banyak NGO dibentuk hanya untuk merespon meningkatnya dana asing yang disalurkan melalui komunitas NGO. Edward dan Hulme (1995 : 4) dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa ledakan NGO di tahun - tahun belakangan ini bukan suatu hal yang kebetulan belaka, juga bukan semata - mata respon terhadap inisiatif lokal dan kegiatan sukarela. Ledakan ini pada dasarnya adalah proses yang muncul akibat dari semakin besarnya bantuan resmi asing untuk NGO (Soeharko : 2003)

Tabel 1
Klasifikasi NGO berdasarkan kegiatannya menurut Philip Eldridge



Sumber : Eldridge, P .1989. LSM dan Negara. Prisma No.7. LP3ES. Jakarta

Tabel 2

Pendekatan NGO dengan Pemerintah menurut Philip Eldridge

Tiga Pendekatan NGO dengan Negara	High Level Partnership: Grassroots Development	Model ini membatasi diri pada upaya untuk memengaruhi kebijakan melalui badan-badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya Flora Family Foundation, Yayasan Insan Sembada (YIS)
	High level Politics: Grassroot mobilization	LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara saksama perkembangan politik domestik. Contohnya Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
	Empowerment at the grassroot	LSM pada model ini biasanya menjalin hubungan yang minim dengan badan-badan milik pemerintah. Mereka berkeyakinan bahwa kelompok ini akan mampu menumbuhkan sebuah gerakan masyarakat yang kuat meskipun tidak terstruktur secara informal. Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB), dan BirdLife International.

Sumber : Eldridge, P .1989. LSM dan Negara. Prisma No.7. LP3ES. Jakarta

2. Teori Transnasionalisme

Dalam perkembangannya, ilmu hubungan internasional telah memberikan tempat bagi aktor-aktor baru (*non-state actors*), negara tetaplah menjadi aktor utama yang dikaji dalam ilmu hubungan internasional. Interaksi transnasional terus mengalami peningkatan dalam perkembangannya, hal ini terbukti dengan adanya perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, komunikasi, transportasi dan organisasi. Hal-hal yang meruntuhkan batasan suatu negara antara lain

interdependensi ekonomi internasional, komunikasi massal, kemudahan bepergian melintasi batas negara dan pertumbuhan organisasi-organisasi transnasional.

Dalam perspektif transnasionalisme, negara menjadi tolak ukur dalam hubungan internasional. Transnasionalisme dapat dimaknai *trans/across borders of nations*, dimana batas-batas negara dapat dilewati oleh manusia. Transnasionalisme saat ini semakin kompleks dengan semakin membesarnya arus globalisasi di dunia. Menyadari hal itu, maka negara perlu untuk mempertahankan kepentingan atau interestnya dengan cara penekanan ide nasionalisme oleh sebuah negara itu sendiri.

Perkembangan transnasionalisme bersumber pada dua hal, yaitu pemikiran manusia dan interaksi global. Sedangkan aliran dalam transnasionalisme sendiri dinamakan globalisme dan kosmopolitanisme. Hal ini mengacu pada semakin luasnya perkembangan globalisasi di dunia dimana globalisasi telah menciptakan politik dunia yang semakin kompleks. Dengan adanya transnasionalisme membuat hubungan elemen politik dunia semakin memiliki relasi yang kompleks dan saling berkaitan antara negara dan aktor-aktor non negara. Globalisasi yang berarti arus migrasi dunia, baik dalam bentuk manusia, kapital hingga ide-ide merupakan salah satu arus transnasionalisme dalam hal *across the classic boundaries* (negara). Dewasa ini, *transfer of human, ideas, and capitals* sangatlah berperan penting dalam hubungan internasional (*world politics*). Perspektif globalisasi membuat seseorang dapat melihat bagaimana peran perpindahan yang melewati batas antar negara menciptakan dinamika yang lebih baru dalam perpolitikan dunia (*world politics*), inilah yang dinamakan transnasionalisme dalam politik dunia.

Dalam sudut pandang realisme, bahwasanya aktor tunggal dalam hubungan internasional adalah negara dan sistem internasional merupakan anarki yang

kemudian dibutuhkan *struggle of power* dalam mempertahankan eksistensi negara dan *balance of power* (Pettiford, 2009). Sehingga konsep transnasionalisme dijelaskan oleh realisme adalah sebagai salah satu upaya dari negara untuk mempertahankan eksistensinya dari tekanan luar yang berusaha menghancurkan. Kegiatan semua kator hubungan internasional itu tak lain karena adanya kepentingan.

Sementara itu, liberalisme melalui asumsi dasarnya bahwa peran transnasionalisme adlah untuk memajukan martabat kehipan individu melalui upaya mandiri yang difasilitasi oleh negara. Transnasionalisme adalah kegiatan kerjasama yang melintasi batas negara untuk menciptakan perdamaian dunia. Maka dari itu, aktor non-state menjadi aktor utama dan state mengawasi berjalannya kegiatan-kegiatan internasional agar tetap pada jalurnya.

Yang terakhir yaitu dari pandangan konstruktivisme bahwasanya sistem internasional lebih dikenal dengan *international society*. Sesuai dengan asumsi dasarnya terkait citra/nilai, konstruktivis memandang semua aktor internasional memiliki kedudukan yang sama, baik itu state maupun non-state. Sebab, yang membedakan signifikan tidaknya peran mereka adalah *discourse/wacana* yang diembannya, seberapa nilai baik untuk semua.

Robert Keohane lebih memilih istilah “world politic” dalam hubungan internasional karena hubungan transnasional dan transgovernmental semakin penting dan banyak hal yang penting dalam politik dunia yang berlangsung interaksinya oleh aktor-aktor hubungan internasional. Setidaknya ada tiga kontribusi pemikiran menurut Keohane (Mukti, 2012), *pertama*, semakin bermunculannya aktor-aktor baru dalam hubungan transnasional, terutama terkait

dengan isu-isu ekonomi politik internasional, bahwa hubungan antar bangsa akan lebih cenderung untuk tidak bersifat konfliktual, tetapi hubungan yang saling menguntungkan. *Kedua*, hubungan kekuatan antar negara terbentuk bukan karena kepemilikan sumber-sumber kekuatan yang koersif, tetapi terbentuk dari keadaan yang asimetris terkait isu spesifik dalam hubungan yang saling bergantung antar bangsa. Maksudnya adalah semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh negara maka negara tersebut akan semakin kuat sebaliknya, semakin sedikit sumber daya yang dimiliki sebuah negara, maka semakin lemah pula negara tersebut. *Ketiga*, peranan informasi sebagai elemen dasar sistem internasional. Dalam hubungan internasional dengan memahami secara akurat peran yang dimainkan oleh kuantitas, kualitas dan distribusi sebuah informasi, maka kita akan dapat memahami lebih mudah perilaku sebuah negara dari pada hanya mempreferensikan gagasan-gagasan tentang kekuatan dan strategi.

Melihat fenomena internasional saat ini yang semakin mengarah pada pandangan transnasionalisme, maka sangatlah perlu bagi kita untuk menganalisa dengan perspektif ini. Bahkan hubungan transnasional menjadi kajian yang sangat relevan dewasa ini.

“Transnational relations is a regular interactions across national boundaries. When at least one actor is a non-state agent or does not operate on behalf of a national government or an intergovernmental organization (Risse, 1995).”

Maksudnya bahwa interaksi tersebut menurut Risse berjalan secara reguler, tidak hanya reaksional saja. Dalam hal ini Risse juga menekankan bahwa harus ada *non-state actors* yang melewati batas-batas negara, seperti *Multinational Corporation* atau *Non-Governmental Organization*. Ini sangatlah sesuai dengan

pandangan-pandangan liberalisme dalam hubungan internasional. Maka sudah selayaknya jika didapati dalam mengaji transnasionalisme dalam perspektif liberalisme sangatlah besar perannya, termasuk globalisasi. Ada beberapa bentuk perpindahan yang terjadi dalam pandangan transnasionalisme. Menurut Nye Jr. Dan Keohane, secara umum setidaknya ada 4 tipe arus dalam interaksi global (Keohane, 1971), antara lain :

1. Komunikasi : perpindahan informasi, yang dapat berupa transfer kepercayaan, ide dan doktrin,
2. Transportasi : perpindahan benda fisik, termasuk perlengkapan perang dan properti atau benda yang di ekspor-import,
3. Pembiayaan / modal : perpindahan uang dan instrument kredit untuk modal,
4. Perjalanan : perpindahan manusia yang melewati batas-batas negara.

Apa yang disebutkan oleh Nye Jr. dan Keohane saat ini telah kita lihat dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat merasakan *transfer of ideas* dengan orang lain melalui komunikasi dan interaksi masyarakat global, bagaimana masyarakat global dapat terhubung melalui media sosial yang melalui batas-batas negara. Selain itu juga semakin maraknya *transfer of student* melalui universitas-universitas yang menjalin kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Transnasionalisme dalam hal ini sangatlah dekat dan memiliki potensi besar bagaimana masyarakat global dapat merasakan *the absence of boundaries* yang membuat transfer informasi dan pemikiran dengan mudah tersalurkan melalui saluran-saluran komunikasi internasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu tujuan atau kajian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai persoalan tertentu. Adapun beberapa hal yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah :

1. Menerapkan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional pada kasus-kasus aktual sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang dipelajari selama perkuliahan.
2. Menganalisis interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional yaitu Negara dan Organisasi Internasional dalam menanggapi isu perubahan iklim.
3. Menganalisis peran NRDC dalam meminimalisir dampak perubahan iklim di India dengan cara membangun energi surya yang bekerja sama dengan aktor lain.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh suatu hipotesa atau jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu :

Pertama, kerjasama yang dilakukan oleh Natural Resources Defence Council dan Pemerintah India dengan melakukan penelitian dan aktivitas kebijakan seperti, membuat program untuk meningkatkan kualitas energi dan pembangunan ekonomi. *Kedua*, ketidakmampuan Pemerintah India dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya (perubahan iklim) maka Pemerintah India membutuhkan aktor lain dalam hubungan transnasional.

F. Metodologi Penelitian

Penulis berupaya mengembangkan tulisan yang bercorak deskriptif, yang memberikan penjelasan tentang kerjasama yang dilakukan oleh NRDC (*Natural Resources Defence Council*) dengan pemerintah India dalam meminimalisir dampak perubahan iklim di India dengan membangun energi surya yang ramah lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri-industri besar di negara sedang berkembang tersebut.

Penulis mencoba menganalisa proses isu perubahan iklim sebagai agenda perpolitikan internasional yang menekan negara-negara sedang berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan ikut serta dalam meratifikasi Kesepakatan Paris. Dalam penulisan penelitian ini penulis menghimpun data lewat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data melalui bacaan (*general reading*) dengan mengumpulkan materi tulisan lewat referensi buku-buku, data yang didapat dari NRDC melalui email, artikel-artikel yang berhubungan dengan lahirnya isu perubahan iklim, diselenggarakannya forum-forum atau konferensi internasional, perubahan iklim sebagai permasalahan dalam negeri india, peranan NRDC di dunia Internasional, respon pemerintah India terhadap pembangunan energi surya, kerjasama yang dilakukan NRDC dengan pemerintah india dan tantangan india dalam membangun energi surya. Beberapa literature yang penulis miliki sendiri, dan meminjam dari berbagai perpustakaan yang ada. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber data dan informasi lain. Adapun mengenai analisis data, penulis menggunakan metode induktif, atas berbagai materi tulisan dengan mencari hal-hal khusus yang tampak dari materi-materi yang dibaca. Beberapa data diperoleh dari

banyak literatur yang penulis kumpulkan dan analisa dengan cara membandingkan serta melakukan seleksi data.

G. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian yang dibatasi waktu pada tahun 2009-2016. Tahun 2009 adalah awal masuknya NRDC ke negara India untuk melakukan kerjasama terkait isu perubahan iklim dengan mengukung pembangunan energi surya yang ramah lingkungan. Serta, pada tahun 2016 India telah meratifikasi Kesepakatan Paris dimana hal ini menjadi kesiapan bagi india dalam mengurangi produksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri-industri kimia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah upaya penulisan, maka sistematika penelitian ini akan dituliskan dalam kerangka per-bab. Sistematika pembahasan dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Penulis memaparkan pendahuluan sebelum menjelaskan lebih jauh tentang proses kerjasama yang dilakukan oleh NRDC dan pemerintah India terkait permasalahan perubahan iklim di negara sedang berkembang. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, kerangka teori, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Isu Perubahan Iklim dan Dinamika Pembangunan
India**

Bab ini menjelaskan bagaimana isu perubahan iklim menjadi agenda perpolitikan internasional dan proses pembangunan yang ada di India serta akan dijelaskan pula bagaimana posisi negara sedang berkembang dalam permasalahan isu perubahan iklim.

**BAB III : Keterlibatan NRDC dalam Meminimalisir Dampak
Perubahan Iklim di India**

Pada bab ini membahas terlebih dahulu mengenai peranan yang dilakukan *Natural Resources Defence Council* (NRDC) sebagai *International Non-Governmental Organization* dalam menanggapi isu perubahan iklim. Kemudian akan membahas sekilas terkait NRDC itu sendiri yang dilanjutkan lebih rinci mengenai tahapan kerjasama antara NRDC dengan Pemerintah India pada tahun 2009-2016.

**BAB IV : Implikasi Kerjasama NRDC dengan Pemerintah India
Terhadap Penanganan Perubahan Iklim di India**

Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana arah pembangunan India pada tahun 2009-2016 kemudian

dilanjutkan dengan energi terbarukan sebagai respon Pemerintah India terhadap perubahan iklim.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.